

Harta Negara

Bocor Rp 33 T

BPK: Banyak Pejabat Tak Patuh

JAKARTA, TRIBUN - Audit yang dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) periode 2003 sampai semester I 2011 menemukan 305 kasus yang diduga tindak pidana. Nilai kerugian negara dalam 305 kasus itu mencapai Rp 33,66 triliun.

Ketua BPK, Hadi Poernomo, mengungkapkan hal itu saat memberikan sambutan dalam penyerahan ikhtisar hasil pemeriksaan BPK semester I dalam rapat paripurna di DPR, Jakarta, Selasa (4/10).

Hadi mengatakan, dari 305 kasus itu, sebanyak 139 kasus belum ditindaklanjuti oleh insitusi penegak hukum. Sedang-



TRIBUN/DOK

” DPR melihat potensi penyimpangan. Sebelumnya kami hanya curiga mengapa persoalan kelangkaan minyak dan gas belum selesai. ”

PRAMONO ANUNG
Wakil Ketua DPR

kan sebanyak 166 kasus telah dan tengah ditangani oleh Kejaksaan, Kepolisian, dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Rincian penanganan itu yakni 41 kasus telah dilimpahkan ke penyidik, 21 kasus dalam penelitian, 24 kasus da-

lam penyelidikan, 10 kasus dalam penyidikan, 12 kasus dalam proses sidang, 47 kasus telah divonis. “Sebelas kasus dihentikan,” kata Hadi.

Dari total 11.430 kasus yang

■ Bersambung ke Hal 7

menjadi objek pemeriksaan keuangan pada semester I tahun 2011, BPK menemukan potensi kerugian negara sebesar Rp 7,71 triliun atas 3.463 kasus temuan.

"Itu merupakan temuan ketidakpatuhan yang mengakibatkan kerugian, potensi kerugian, dan kekurangan penerimaan," kata Hadi.

Sedangkan, temuan BPK atas pemeriksaan berupa ketidakhematan, ketidakefisienan, dan ketidakefektifan tercatat sebanyak 7.967 kasus, senilai Rp 18,96 triliun.

Total objek pemeriksaan BPK dalam semester I tahun 2011 sebanyak 682 objek pemeriksaan, yaitu pemeriksaan keuangan sebanyak 460 objek, pemeriksaan kinerja sebanyak 14 obyek dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu (PDTT) sebanyak 208 objek.

Seluruh objek pemeriksaan keuangan BPK meliputi Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP), Laporan Keuangan Kementerian Lembaga (LKKL), Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) dan Laporan Keuangan badan lainnya.

BPK mengklaim telah menyelamatkan uang negara dan daerah sebesar Rp 25,5 triliun sejak tahun 2005 hingga semester I 2011. Jika dirata-ratakan, per tahunnya BPK telah menyelamatkan uang negara Rp 5 triliun atau lebih besar dari anggaran BPK per tahunnya yang sebesar Rp 2,85 triliun.

Kerugian Energi Primer

Sementara itu, hasil audit BPK terhadap pemakaian energi hulu primer pada 2009 dan 2010 menunjukkan potensial kerugian negara yang cukup besar. Nilainya mencapai Rp 37,4 triliun.

Wakil Ketua DPR, Pramono Anung, membeberkan hal tersebut kepada wartawan di

DPR, Selasa.

Sebelumnya, Senin (3/10) lalu, Pramono hanya menyebut kerugian negara dari pemakaian energi primer tersebut tiga kali lipat kasus Century. Untuk diketahui, *bail out* Bank Century mencapai Rp 6,7 triliun.

Pramono mengatakan, DPR melihat potensi penyimpanan dalam pemakaian energi hulu primer. Karena itulah, pihaknya meminta BPK untuk melakukan audit selama dua tahun, yakni 2009 dan 2010.

"Audit tersebut selesai pada 16 September, laporan hasil audit masuk ke DPR pada 25 September, dan diumumkan di sidang paripurna. Surat itu juga masuk ke Komisi VII," kata Pramono.

Pramono memaparkan, potensial kerugian negara pada 2009 diperkirakan senilai Rp 17,7 triliun, dan pada 2010 sejumlah Rp 19,7 triliun.

Kerugian tersebut diperkirakan pada sektor minyak dan gas bumi. Menurutnya, temuan ini ada kaitannya juga dengan kebijakan pemerintah dan perusahaan negara.

"Nilai potensial ini sangat besar. Karena itu nanti akan kami cari tahu apa saja yang berhubungan dengan energi hulu primer. Agar tidak jadi prasangka, kami juga akan minta Komisi VII untuk mempelajari dan mendalami temuan BPK tersebut," imbuhnya.

Pramono menampik pihaknya terlambat membeberkan masalah ini. Dia mengaku baru mengetahui potensi kerugian negara dari hasil audit tersebut.

"Sebelumnya kami hanya mencurigai mengapa persoalan kelangkaan minyak dan gas belum selesai," tegasnya.

Meski demikian, Pramono enggan mengomentari ke-

mungkinan adanya indikasi korupsi dalam temuan BPK itu. "Nanti saja, itu tugas teman-teman di Komisi VII," ujarnya.

Waspadai Akhir Tahun

Wakil Ketua BPK, Hasan Bisri, dalam konferensi pers di Kantor BPK, Jakarta, Selasa, mengatakan, BPK akan waspadai serapan anggaran Kementerian Lembaga (K/L) pada akhir tahun. Pasalnya, serapan anggaran K/L hingga pertengahan semester dua ini masih sangat rendah.

"Serapan awal rendah kami melihat pasti ada masalah kayaknya, bagaimana dia bisa mengeluarkan 40 persen dalam dua bulan dalam anggaran yang mereka miliki," ungkap Hasan Bisri.

Lebih lanjut dia mengatakan, BPK akan terus mengawasi belanja kementerian dan lembaga yang disinyalir akan menggenjot belanja mereka di akhir 2011 ini. "Ada indikasi sendiri, di mana kami akan waspada mengenai transaksi di ujung," pungkasnya.

Sebelumnya Komisi IV DPR mendapati realisasi anggaran dari kementerian yang menjadi mitranya masih rendah pada September 2011 ini.

Anggota Komisi IV DPR, Mamur Hasanuddin mengatakan, meskipun serapan anggaran dibanding tahun lalu di periode yang sama, mengalami peningkatan, namun serapan anggaran yang telah direncanakan meleset.

"Tidak satupun kementerian di Komisi IV yang telah mencapai serapan anggaran hingga 80 persen. Kementerian Kehutanan 42,28 persen, Kementerian Kelautan dan Perikanan 36,07 persen dan Kementerian Pertanian 41,73 persen," jelas Mamur.

Serapan anggaran yang hanya menyisakan waktu tiga

bulan lagi, namun dana yang di serap lebih dari setengah anggaran yang ditetapkan akan menimbulkan banyak penyimpangan dan kebocoran.

Tidak Patuh

Pada bagian lain, Hasan Bisri mengatakan, masih banyak pengelola keuangan negara yang tidak patuh dalam mengelola keuangan. Dengan tidak patuhnya pengelola keuangan tersebut, efisiensi penggunaan anggaran masih akan susah dilakukan.

"Masih ada kepatuhan yang tidak dipatuhi oleh pengelola keuangan negara, sementara negara maju sudah tidak bicara itu, kita masih kepatuhan saja," ungkapnya. "Masih bicara ikuti aturan saja belum selesai," tambahnya.

Lebih lanjut dia mengatakan, untuk instansi-instansi yang sudah patuh dalam mengelola keuangan, pemeriksaan BPK akan ditingkatkan ke audit kerja, oleh karena itu kepatuhan ini, menurut Hasan, adalah hal yang harus dila-

kukan. Anggota BPK, Taufiequirachman Ruki, pada kesempatan yang sama mengakui adanya kebocoran dalam penerimaan uang negara.

Menurut Ruki, bila kebocoran itu bisa dihentikan, maka akan signifikan membantu keuangan negara, dan hal itu sedang dilakukan oleh BPK.

"Jadi, perlu pencegahan kebocoran. Bukan hanya peningkatan pembelanjaan, tapi pada penerimaan negara juga terjadi kebocoran. Itu yang ingin kita kejar," ungkapnya.

Ruki kemudian mencotokkan dari sisi pajak. Menurut dia, bila bisa tertangani dengan baik, maka sisi ini akan sangat membantu dalam penerimaan negara. (tribunnews/adelcoz/aco/wil)